

# SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



---

## **BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Menyerahkan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2018 kepada Tujuh Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah**

Dalam rangka memenuhi kewajibannya Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan atas LKPD TA 2018 pada Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, hal ini berdasarkan undang-undang Nomor 15 tahun 2006 dan undang-undang Nomor 15 tahun 2004. Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai apakah Laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dengan memperhatikan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas pengendalian intern.

Pada hari ini tanggal 21 Mei 2018, bertempat di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Bpk. Ade Iwan Ruswana menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD TA 2018 kepada DPRD dan Kepala Daerah pada tujuh Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, Pemerintah Kabupaten Kapuas, dan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2018 terdiri dari tiga laporan utama yaitu LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2017, LHP atas Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, dapat disimpulkan bahwa penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 pada tujuh Pemerintah Daerah tersebut telah sesuai dengan SAP berbasis akrual, telah diungkapkan secara memadai, dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material, serta telah menyusun dan merancang unsur-unsur SPI yakni lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Untuk itu, BPK RI memberikan opini "**Wajar Tanpa Pengecualian**" atas Laporan Keuangan tahun Anggaran 2018 pada tujuh Pemerintah Daerah tersebut.

Namun demikian, tanpa mengesampingkan keberhasilan yang telah dicapai, BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang hendaknya menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah, diantaranya

1. Pengelolaan dan pencatatan Aset Tetap belum sepenuhnya memadai;
2. Terjadinya kekurangan volume dan ketidaksesuaian dengan spesifikasi teknis dalam beberapa pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang dan jasa diantaranya pengadaan jasa konsultasi;

---

*Informasi lebih lanjut:*

**Subbagian Humas & TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah**

**Telp: (0536) 3241118**

**Email: palangkaraya@bpk.go.id**

# SIARAN PERS

## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



3. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum memadai, diantaranya terkait penatausahaan pajak daerah dan pemungutan pajak/retribusi daerah yang tidak sesuai ketentuan sehingga berdampak pada terjadinya kekurangan penerimaan pajak dan retribusi daerah;
4. Pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja hibah belum sepenuhnya memadai, diantaranya belanja hibah yang belum dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah dan pengelolaan hibah uang tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011.

BPK mengharapkan Pemerintah Daerah untuk secepatnya menindaklanjuti beberapa temuan, khususnya yang terkait dengan pengelolaan dan pencatatan aset tetap, baik temuan-temuan sebelumnya maupun temuan-temuan pada TA 2018. Jika tidak segera ditindaklanjuti, hal tersebut sangat berpotensi mempengaruhi opini dimasa mendatang, mengingat akumulasi nilainya akan melebihi batas toleransi yang telah ditetapkan.

Sementara itu, temuan kekurangan volume fisik atau ketidaksesuaian dengan spesifikasi teknis pada beberapa pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang dan jasa pada beberapa SOPD yang menimbulkan kelebihan pembayaran adalah sebesar Rp16,82 miliar dan temuan kekurangan penerimaan pada beberapa SOPD yang menimbulkan kekurangan penyetoran ke kas negara/daerah adalah sebesar Rp7,76 miliar, sehingga total nilai temuan tersebut adalah sebesar Rp24,58 miliar. Atas temuan tersebut telah disetorkan kembali ke Kas Daerah sebesar Rp5,86 miliar. Sedangkan sisanya sebesar Rp18,72 miliar, diharapkan dapat disetorkan ke Kas Daerah pada saat pemantauan tindak lanjut nanti.

---

*Informasi lebih lanjut:*

**Subbagian Humas & TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah**

**Telp: (0536) 3241118**

**Email: palangkaraya@bpk.go.id**